

	News Title : Bappebti Blokir 218 Domain Situs Perdagangan Berjangka Ilegal	
	Media Name : idxchannel.com	Journalist : Wahyudi Aulia Siregar
	Publish Date : 20 April 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Economics	Topic : Blokir Situs Ilegal

100% ORIGINAL / 100% RUMAH

Bappebti Blokir 218 Domain Situs Perdagangan Berjangka Ilegal

ECONOMICS · Wahyudi Aulia Siregar · Rabu, 20 April 2022 19:01 WIB

Pemblokiran dilakukan sebagai langkah penertiban, dengan pelaksanaannya bekerjasama dengan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).



Bappebti Blokir 218 Domain Situs Perdagangan Berjangka Ilegal (foto: MNC Media)

IDXChannel - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi melakukan pemblokiran terhadap 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) selama Januari hingga Maret 2022 lalu.

Pemblokiran dilakukan sebagai langkah penertiban, dengan pelaksanaannya bekerjasama dengan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

BACA JUGA:

Banyak yang Mau Untung Cepat, Bappebti: Investasi Bukan Cuma Tebak Harga Naik atau Turun

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Aldison, menegaskan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulasi luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti," ujar Aldison, dalam keterangan resminya, Rabu (20/4/2022).

BACA JUGA:

Dinilai Lambat, DPR Semprot Bappebti Soal Kasus Indra Kenz-Doni Salmanan

Menurut Aldison, Bappebti secara rutin melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti. Pengawasan dan pengamatan serta pemblokiran ini sebagai langkah pencegahan (preventif) adanya kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PBK tanpa memiliki izin Bappebti.

"Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK," pungkasnya.

BACA JUGA:

Kemendag Tegaskan Crypto Adalah Ranah Bappebti

Aldison juga mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko bagi masyarakat. Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi investor dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.

"Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut," ungkap Aldison.

Selain itu, tegas Aldison, Bappebti tidak dapat memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka dihimbau agar terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan <https://www.bappebti.go.id>," tandas Aldison. (TSA)

